

KERTAS DATA AUDIT

Unit Kerja : fmipa
Sasaran : Pengelolaan Keuangan
Masa Audit : Februari 2019
Bulan Audit : Maret 2019
Auditor : auditor\$

Kode Temuan 1.04 : Ketidapatuhan terhadap Peraturan : administrasi

Deskripsi Masalah : Pertanggungjawaban pembayaran/ pembelian barang/jasa tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

Uraian

a. Kondisi:

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan bulan Maret tahun 2019 di Unit Kerja : fmipa belum sepenuhnya tertib, antara lain:

1. Kelengkapan berkas SPJ

No	Kelengkapan	Keterangan		
		Ada / Tidak ada	Jumlah	Nominal
1	Rekap Per Mak	Tidak Ada		Rp.
2	Rekap SPJ (urut)	Tidak Ada		Rp.
3	Kwitansi di Rekap SPJ	Tidak Ada		Rp.
4	Fisik kwitansi yang ada	Tidak Ada		Rp.
5	Kwitansi yang ada temuan	Tidak Ada		Rp.
6	BA Serah Terima UMK	Tidak Ada		Rp.
7	BA Rekonsiliasi	Tidak Ada		Rp.
8	Transaksi Jurnal	Tidak Ada		Rp.
9	Bukti Setor Saldo	Ada	5	Rp. 29800000

2. Ketidapatuhan terhadap aturan yang berlaku

Kwitansi	nominal	keterangan
1	1	1
2	2	2
3	3	3

Kwitansi	nominal	keterangan
5	5	5

- Hasil audit dokumen SPJ diketahui bahwa pengelolaan administrasi keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan BPP di Unit Kerja : fmipa yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

ini bulan Februari

Kwitansi	nominal	keterangan
231	34000	kok samar samar

b. Kriteria

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, Pasal 65 ayat (1): **"Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh bayaran"**.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2018 tentang **Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember**.
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 tahun 2018 tentang **Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2018**.

c. Kesimpulan

Pengelolaan administrasi di Unit Kerja : fmipa belum tertib karena kurangnya pengendalian internal pimpinan Unit Kerja, kekurangcermatan dan belum optimal BPP dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan lemahnya pengawasan PPK terkait, sehingga menyebabkan tertib administrasi keuangan tidak tercapai.

d. Rekomendasi

Pimpinan Unit Kerja menginstruksikan BPP terkait untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban pembayaran/pembelian barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

e. Tanggapan

(Bisa disampaikan dalam kertas terpisah dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Terkait)

Surabaya, 13 Maret 2019

Ka Unit Audit internal Bidang Keuangan,

Menyetujui

Auditan,

Ir. Tony Bambang M.,PGDip

.....